

PENDAMPINGAN KADER DESA DALAM PEMETAAN PENGETAHUAN  
MASYARAKAT TENTANG MASALAH SOSIAL  
UNTUK ASESMEN KOMUNITAS

Sugeng Pujileksono<sup>1</sup>, Mohammad Suud<sup>2</sup>, Christine Lucia Mamuaya<sup>3</sup>,  
Yudi Harianto Cipta Utama<sup>4</sup>, Sari Dewi Poerwanti<sup>5</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

<sup>1</sup>pujileksono\_65@yahoo.co.id, <sup>2</sup>mosu2019@uwks.ac.id, <sup>3</sup>christinemamuaya@gmail.com,

<sup>4</sup>yudiharianto26@gmail.com, <sup>5</sup>saridewi@uwks.ac.id

**Abstract**

*Every society has different knowledge about conditions, situations, problems, needs and social life. But unfortunately, not all people understand the knowledge about their problems, needs, and social life. Development from top to bottom, which does not pay attention to the development of the whole person, causes people to lack sensitivity in mapping and formulating their knowledge. This community service activity aims to provide village cadres with skills in mapping community knowledge about social issues, conducting community assessments, and preparing plans. Its main activities are training and mentoring for village cadres. The target of this community service activity is village cadres who are active in social organizations, namely Family Welfare Empowerment, Integrated Service Post, Youth Organization, and Majelis Taklim in Pengampon Village. The stages of this PKM activity include preparation, implementation, reflection and evaluation. The PKM method includes brainstorming, discussions, interviews, and involvement in community activities. The outputs of this activity are 1) village cadres have skills in mapping community knowledge about social issues, 2) village cadres are able to carry out community needs assessments, and 3) ability to develop participatory planning at the local level. The results of this PKM include: village cadres can map community knowledge about social problems; village cadres can conduct community needs assessments, and; and make participatory plans to solve problems in their village.*

**Keywords:** *social mapping, community knowledge, community assessment, social problems*

**Abstrak**

Setiap masyarakat memiliki pengetahuan yang berbeda-beda tentang kondisi, situasi, masalah, kebutuhan, dan kehidupan sosialnya. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat memahami pengetahuan tentang masalah, kebutuhan, dan kehidupan sosialnya. Pembangunan dari atas ke bawah, yang kurang memperhatikan pembangunan manusia seutuhnya, menyebabkan masyarakat kurang memiliki kepekaan dalam memetakan dan merumuskan pengetahuannya. Kegiatan PKM (Pengabdian kepada Masyarakat) ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada kader desa dalam melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial, melakukan asesmen komunitas, dan menyusun perencanaan. Kegiatan utamanya adalah pelatihan dan pendampingan kepada kader desa. Sasaran PKM ini adalah kader desa yang aktif di organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu PKK, Posyandu, Kepemudaan (Karang Taruna), dan Majelis Taklim di Desa Pengampon. Tahapan kegiatan PKM ini meliputi persiapan, pelaksanaan, refleksi dan evaluasi. Metode PKM meliputi curah pendapat, diskusi, wawancara, dan keterlibatan pada kegiatan komunitas. Luaran kegiatan ini adalah 1) kader desa memiliki keterampilan dalam melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial, 2) kader desa mampu melakukan asesmen kebutuhan komunitas, dan 3) kemampuan menyusun perencanaan partisipatif di tingkat lokal. Hasil PKM ini meliputi: kader desa dapat melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial; kader desa dapat melakukan asesmen kebutuhan komunitas, dan; dan membuat perencanaan partisipatif untuk menyelesaikan masalah di desanya.

**Kata kunci:** pemetaan sosial, pengetahuan masyarakat, asesmen komunitas, masalah sosial

## **PENDAHULUAN**

Perbedaan utama antara pembangunan dari atas ke bawah (pembangunan model pertumbuhan ekonomi) dan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (pembangunan manusia) adalah: a) Akses ke informasi adalah untuk semua kelompok dalam populasi, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan; b) Informasi adalah alat dan akses proses informasi untuk membangun kemandirian, pemberdayaan, masyarakat sipil, partisipasi dan kesetaraan gender; c) Pengetahuan asli atau tradisional dan informasi yang dihasilkan secara lokal diberi status tinggi; d) Saluran komunikasi tradisional dihormati dan tidak dianggap sebagai penghalang pembangunan (Mchombu, 2004). Kunci keberhasilan pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah penciptaan akses terhadap informasi yang dinilai secara kritis untuk berbagai demografi serta informasi yang berhubungan dengan berbagai isu (perekonomian, pertanian, masalah sosial hingga hak asasi manusia).

Namun, pada kenyataannya pembangunan yang berpusat pada masyarakat, sangat sulit ditemukan di desa. Kecenderungan pembangunan di desa masih lebih bernuansa dari atas ke bawah, dibanding pembangunan yang berpusat pada manusia. Desa merupakan wilayah geografis, demografis, dan sosiologis terakhir yang melaksanakan program-program pembangunan nasional dari berbagai kementerian. Akibatnya, dalam memahami permasalahan sosial yang terjadi di masing-masing desa, menjadi relatif sama. Masalah sosial adalah permasalahan yang dikonstruksikan oleh pemerintah melalui program-program kementerian. Sebagai contoh, masalah sosial yang disosialisasikan oleh Kementerian Sosial dengan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (sekarang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Meski, tidak semua masyarakat paham

tentang penggolongan masalah sosial tersebut. Dalam pembangunan yang berpusat pada manusia, masing-masing masyarakat dapat mendefinisikan masalah yang dihadapinya sesuai dengan kondisi, situasi, sistem nilai, dan tradisi yang terjadi di sekitarnya.

Sejatinya, masyarakat memiliki pengetahuan tersendiri tentang masalah sosial yang terjadi di desanya. Untuk mendapatkan pengetahuan asli tentang masalah sosial di desa, maka perlu dilakukan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial di desa. Selama ini, pendataan masalah sosial di desa lebih banyak mengikuti format dari Kementerian / Dinas, sehingga masalah sosial yang dipahami oleh masyarakat lokal sering kali terabaikan. Data masalah sosial di kantor desa hanya sebatas angka-angka dalam bentuk tabel/tabulasi dengan istilah yang relatif seragam. Begitu pula yang terjadi di Desa Pengampon Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Di sinilah letak pentingnya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kader desa untuk memetakan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial di desa. Hasil pemetaan yang dilakukan oleh kader desa, merupakan perwujudan pengetahuan asli masyarakat desa tentang masalah sosial yang dapat digunakan untuk melakukan profiling dan perencanaan partisipatif.

Pemetaan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memahami kondisi dan masalah sosial masyarakat Desa Pengampon yang diwujudkan dalam bentuk visualisasi atau gambar. Proses pemetaan sosial dilakukan melalui penelusuran, pengamatan, wawancara, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial, penting dilakukan karena setiap masyarakat memiliki kondisi sosial yang berbeda-beda yang akan menyebabkan masyarakat memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda pula. Pemetaan, selain untuk

mengetahui pemaknaan masalah, sumber masalah, jenis masalah, potensi sumber daya dan kelembagaan sosial masyarakat, juga untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan di tingkat desa ataupun kecamatan terkait dengan masalah sosial.

Pelibatan masyarakat atau kader desa dalam pemetaan pengetahuan masyarakat merupakan bentuk partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Fungsi khusus pembangunan masyarakat diantaranya: a) Mengidentifikasi, memelihara dan memutakhirkan data berbagai kelompok dalam masyarakat; b) Melakukan penilaian kebutuhan masyarakat; c) Melakukan survei komunitas dan menyusun profil; d) Membantu dalam mobilisasi sumber daya untuk intervensi pengembangan masyarakat; e) Memobilisasi anggota masyarakat untuk kerja komunal dan proyek swadaya (De Beer & Swanepoel, 1998).

Berdasarkan fungsi tersebut, maka kegiatan ini memiliki relevansi dengan kelima fungsi tersebut di atas.

Sasaran kegiatan PKM ini adalah kader desa yang aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan di Desa Pengampon. Kader kegiatan sosial kemasyarakatan yang menjadi fokus PKM ini organisasi sosial kemasyarakatan yang merepresentasikan kebutuhan dan masalah perempuan dan keluarga (PKK), kesehatan bayi dan anak (Posyandu), kepemudaan (Karang Taruna), dan sosial-keagamaan (Majelis Taklim) di Desa Pengampon. Pengurus atau aktivis di masing-masing organisasi sosial kemasyarakatan tersebut, dapat dikatakan sebagai kader desa yang memberikan kontribusi waktu, tenaga, uang, dan pikiran untuk pembangunan di tingkat desa/lokal.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan kader desa untuk melakukan pemetaan sosial, maka Tim PKM menawarkan kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial. Pengetahuan dan metode pemetaan sosial, sebagian telah diperoleh para kader desa melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak eksternal desa (dinas, LSM, ataupun perguruan tinggi). Namun,

pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial, belum pernah diperoleh dan dianggap sebagai hal baru. Dasar pertimbangan Tim PKM mengangkat tema ini, didasari oleh asumsi bahwa “masyarakatlah yang paling tahu tentang diri dan lingkungannya”.

Pengetahuan masyarakat (community knowledge) dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, praktik, inovasi atau teknologi yang diciptakan atau dikembangkan dari generasi ke generasi oleh masyarakat lokal tentang konservasi dan penggunaan sumber daya alam dan manusia. <https://www.lawinsider.com/dictionary/community-knowledge> Knowledge community dimaknai sebagai pengetahuan lokal masyarakat dalam manifestasi transformasi sosial masyarakat yang dengan menggunakan dorongan inovasi dan kreativitas mampu mengiringi perkembangan arus globalisasi (Rudito & Famiola, 2008).

Asesmen kebutuhan masyarakat adalah proses kolaboratif yang melibatkan pemangku kepentingan masyarakat dalam menentukan sifat dan tingkat kebutuhan dan sumber daya dalam masyarakat. Asesmen kebutuhan masyarakat biasanya mengidentifikasi dan menanggapi masalah sosial tertentu atau masalah dalam masyarakat. Sebagai bagian dari asesmen keseluruhan, asesmen kebutuhan masyarakat dapat memeriksa akses dan ketersediaan layanan, serta koordinasi layanan antar lembaga. Pada saat yang sama, asesmen kebutuhan masyarakat mengidentifikasi aset dan sumber daya masyarakat yang ada (misalnya, keterampilan, uang, waktu, kekompakan sosial, dan bentuk modal sosial lainnya) yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Ada dua jenis komunitas yang berbeda: komunitas fungsional adalah komunitas di mana anggotanya terlibat oleh kepentingan bersama, dan komunitas geografis adalah komunitas di mana sekelompok orang tinggal di area atau wilayah yang sama (Chun-Chung Chow & Peng, 2015).

## METODE

### Persiapan

Tahap persiapan dalam kegiatan PKM ini adalah:

1. Survai lapangan, dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan Kepala Desa Pengampon dan perangkatnya untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial di desa. Selain dengan Kepala Desa dan perangkatnya, wawancara juga dilakukan kepada kader PKK, pemuda, posyandu, dan pengurus majelis taklim di Desa Pengampon.
2. Analisis masalah dan kebutuhan. Berdasarkan hasil survai lapangan, selanjutnya, dilakukan analisis masalah dan kebutuhan dari para kader pembangunan desa. Berdasarkan hasil analisis masalah dan kebutuhan, kemudian Tim PKM merumuskan kegiatan pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pelatihan dan pendampingan, meliputi pelatihan pemetaan pengetahuan masyarakat, asesmen komunitas, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Rangkaian kegiatan tersebut seperti gambar berikut ini.



Gambar 1: Rangkaian Kegiatan Pelatihan

3. Perencanaan jadwal pelatihan dan pendampingan. Jadwal pelatihan disesuaikan dengan 'jam aktivitas warga'. Pada umumnya warga desa mulai jam 06.00 – 17.00 memiliki aktivitas rutin di sawah, tempat kerja, urusan di sekitar rumah, dan sejenisnya. Oleh karena itu sangat sulit melakukan kegiatan PKM di jam-jam tersebut dan kegiatan diagendakan mulai pukul 18.30 – 21.30. Meski dalam kenyataannya, setiap pelaksanaan kegiatan selalu molor dari waktu yang ditentukan.
4. Perencanaan materi pelatihan dan pendampingan. Berdasarkan hasil survai lapangan dan penjangkauan, materi pelatihan meliputi pengetahuan umum

tentang pemetaan sosial, pengenalan tentang konsep-konsep masalah sosial, asesmen komunitas, dan penyusunan rencana tindak lanjut.

### Proses

Proses kegiatan PKM ini meliputi:

1. Rekrutmen kader desa dalam kegiatan PKM yang berasal dari empat organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu: PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan Majelis Taklim Desa Pengampon. Masing-masing organisasi sosial kemasyarakatan diwakili oleh enam orang pengurus/kader, sehingga peserta pelatihan sebanyak 24 orang.
2. Membangun komitmen diantara Tim PKM dengan peserta pelatihan, yang meliputi kedisiplinan, pencapaian tujuan kegiatan, dan tindak lanjut kegiatan.
3. Memetakan keinginan/harapan peserta, masalah, dan solusi pemecahan masalah.
4. Mempersiapkan peralatan kegiatan.

### Langkah Kerja

Langkah kerja Tim PKM ini adalah sebagai berikut.

1. Keterlibatan Masyarakat  
Guna memahami masalah dan kebutuhan masyarakat, Tim PKM mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa/lokal, yaitu: PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan Majelis Taklim Desa Pengampon. Tujuannya adalah untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang dilakukan, mencatat anggota yang aktif, potensi organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah di tingkat desa/lokal.
2. Perencanaan Kegiatan  
Hasil dari keterlibatan pada kegiatan masyarakat, selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan disusun bersama antara Tim PKM dengan kader desa, sebagai wujud perencanaan partisipatif. Dalam penyusunan perencanaan tersebut juga dibuat komitmen bersama antara Tim PKM dengan kader desa.

Komitmen tersebut meliputi: waktu dan tempat pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, tata tertib dan kedisiplinan. Perencanaan pelatihan meliputi rencana materi, penjadwalan, metode pelatihan, media dan sarana pelatihan, dan output pelatihan.

3. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati dengan alur kegiatan pembukaan, dinamika kelompok dan ice breaking, penyampaian materi, praktik pemetaan, praktik merumuskan asesmen komunitas, praktik menyusun rencana tindak lanjut, dan refleksi dan evaluasi.

4. Pendampingan

Pendampingan dilakukan pada saat kader desa mempraktikkan untuk membuat pemetaan pengetahuan masyarakat, praktik merumuskan asesmen komunitas, dan menyusun rencana tindak lanjut. Pendampingan dilakukan dengan teknik curah pendapat, tanya jawab, dan pemberian contoh-contoh penerapan pemetaan pengetahuan masyarakat, asesmen komunitas, rencana tindak lanjut.

5. Evaluasi dan Umpan Balik

Sebagai rangkaian akhir dari kegiatan PKM adalah melakukan evaluasi dan umpan balik atas kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Pengampon. Evaluasi dilakukan pada proses, materi, sarana dan prasarana, metode, dan fasilitator pelatihan. Umpan balik dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman baru yang diterima oleh kader desa sebagai peserta pelatihan dan harapan dari kegiatan PKM ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan di lokasi pengabdian, solusi yang ditawarkan Tim PKM adalah sebagai berikut.

1. Pengenalan pemetaan sosial sebagai salah satu metode asesmen komunitas kepada Kader Desa. Asesmen

komunitas difokuskan pada pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial yang terjadi di desa. Hasil pemetaan pengetahuan masyarakat, selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan profiling masalah sosial sesuai dengan bidang kegiatan kader desa. Misalnya, kader PKK dapat melakukan profiling tentang masalah-masalah kehidupan keluarga, dan ketetanggaaan yang selanjutnya dapat menyusun perencanaan untuk menangani masalah tersebut. begitu pula dengan kader pemuda, dapat melakukan profiling tentang masalah kepemudaan di tingkat desa dan membuat rencana solutif untuk permasalahan tersebut.

2. Untuk meningkatkan keterampilan kader desa dalam melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat, maka Tim PKM melakukan pelatihan kepada kader desa. Kader desa yang terlibat aktif dalam kegiatan ini adalah kader PKK, kader kepemudaan, kader majelis taklim, dan kader posyandu. Kader dari keempat jenis kelembagaan sosial lokal ini dinilai relatif aktif dibanding dengan kelembagaan sosial lainnya. PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan Posyandu merupakan kelembagaan sosial yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Pelatihan dilaksanakan di rumah warga dan jadwalnya disesuaikan dengan 'jam aktifitas warga', yaitu di jam-jam kader desa tidak lagi melakukan kegiatan rutinitas mencari nafkah. Kegiatan pelatihan dilaksanakan setelah maghrib sampai jam 21.30.

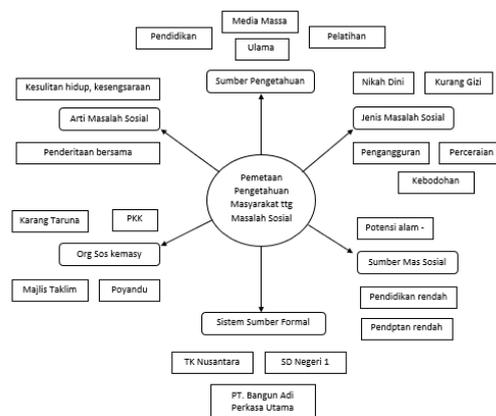
3. Pendampingan dilakukan pada saat kader desa membuat pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial dan menyusun rencana tindak lanjut. Untuk memudahkan kader desa dalam melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat, maka Tim PKM membuat bagan yang digambar di kertas plano. Pada saat melakukan pendampingan, Tim PKM lebih banyak

- berperan sebagai fasilitator.
4. Berdasarkan hasil pelatihan dan pendampingan, selanjutnya kader desa melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial di Desa Pengampon. Praktik pemetaan dilakukan dengan menggunakan kertas plano dan spidol. Teknik pemetaan adalah tanya jawab, diskusi, curah pendapat yang difasilitasi oleh Tim PKM.
  5. Refleksi dan evaluasi terhadap hasil pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial. Peserta merasa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam melakukan pemetaan sosial. Proses pemetaan pengetahuan masyarakat dapat diterapkan untuk topik-topik tertentu yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Misalnya, dapat diterapkan di kelompok petani untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah pertanian (hama, bibit, pupuk, tanah, perairan, penanaman, perawatan, pemanenan). Dengan cara seperti ini, masyarakat Desa Pengampon dapat merumuskan masalah dan kebutuhan sesuai dengan pengetahuan yang berkembang di masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial di Desa Pengampon dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Masalah sosial adalah segala bentuk kesulitan hidup, kesengsaraan, dan penderitaan hidup yang dialami bersama. Sumber pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial berasal dari pendidikan, media massa, ulama, dan pelatihan. Jenis masalah sosial menurut masyarakat meliputi pernikahan diri, perceraian, kekurangan gizi,

pengangguran, dan kebodohan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan potensi dan sistem sumber yang ada di masyarakat, termasuk keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan di desa.”

Hasil pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial adalah seperti gambar berikut ini.



Gambar 2. Pemetaan Pengetahuan Masyarakat tentang Masalah Sosial

Hasil pemetaan tersebut, selanjutnya digunakan untuk melakukan asesmen masalah dan kebutuhan di desa. Untuk merumuskan masalah yang dianggap menjadi prioritas, dilakukan dengan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). Masalah sosial yang dijadikan prioritas penanganan, mempertimbangkan pentingnya dan keseriusan penyelesaian masalah agar tidak berkembang ke arah yang lebih buruk. Berdasarkan praktik merumuskan asesmen masalah sosial menggunakan analisis USG, diperoleh 3 (tiga) prioritas masalah sosial di Desa Pengampon adalah sebagai berikut.

Tabel Prioritas Penentuan Masalah Sosial

No	Prioritas masalah sosial	Ranking	Organisasi sosial kemasyarakatan	Potensi & Sumber
1	Pengangguran	1	Kepemudaan	PT. Bangun Adi
2	Perceraian	2	PKK, Majlis Taklim	
3	Kurang Gizi	3	PKK, Posyandu	Puskesmas Kec

### Pembahasan

Ciri-ciri pembangunan masyarakat

lokal, adalah: 1) Keterlibatan tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Pengampon sebagai tokoh masyarakat formal yang memiliki kewenangan dalam menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya alam di desa. 2) Organisasi sosial kemasyarakatan: seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, Majelis Taklim di desa, merupakan mitra potensial dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa. 3) Dana Masyarakat: meski organisasi sosial kemasyarakatan tidak mempunyai sumber dana tetap, tetapi di PKK ada jimpitan beras, dana untuk makanan sehat balita, kotak amal (Majelis Taklim), dan dana sukarela dari anggota Karang Taruna yang dikembangkan dengan prinsip kegotongroyongan sebagai salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. 4) Materi masyarakat: Segala potensi alam, kelembagaan, dan sosial yang dimiliki di Desa Pengampon merupakan aset yang dapat digunakan menangani masalah sosial, manakala dikelola dengan baik. 5) Pengetahuan masyarakat: pelatihan dan pendampingan dalam kegiatan PKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial yang dapat dijadikan asesmen kebutuhan komunitas dan menyusun perencanaan partisipatif di tingkat desa. 6) Pemberdayaan merupakan proses pengembangan kapasitas pribadi dan sosial, kompetensi, kreativitas, dan kebebasan bertindak. Pengembangan kapasitas, salah satunya dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan.

Prinsip-prinsip yang diterapkan pada kegiatan PKM ini, berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan kebebasan (Greenacre, & Akbar, 2019). Kader desa yang terlibat dalam kegiatan ini memiliki kesetaraan dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pengampon dalam merumuskan asesmen komunitas, perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa. Keaktifan dan keterlibatan kader desa dalam organisasi sosial kemasyarakatan merupakan bukti nyata partisipasi anggota masyarakat dalam pembangunan di desa. Tidak semua warga

desa bersedia meluangkan waktu, tenaga, uang, dan pikirannya untuk kemajuan desanya. Keempat organisasi sosial kemasyarakatan tersebut memiliki kemandirian yang relatif tinggi dalam pengelolaannya, karena pada umumnya tidak bergantung pada pendanaan dari pihak eksternal.

Asesmen masalah dan kebutuhan di tingkat komunitas yang dilakukan oleh kader desa yang terlatih, dapat melahirkan asesmen yang tepat sasaran dan baik. Selanjutnya asesmen masalah dan kebutuhan komunitas dapat dijadikan penyusunan perencanaan di tingkat komunitas. Asesmen komunitas dalam praktik pemberdayaan masyarakat berfokus pada identifikasi kebutuhan dan aset komunitas yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan dan perubahan komunitas. Tim PKM melibatkan warga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam melakukan dan memanfaatkan temuan dari asesmen komunitas. Asesmen komunitas dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan pengorganisasian konsensus untuk melakukan analisis masyarakat dan pendekatan pengembangan masyarakat untuk melakukan pemetaan kebutuhan.

#### **KESIMPULAN**

Kegiatan Tim PKM bersama Kader Desa Pengampon difokuskan pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam melakukan pemetaan pengetahuan masyarakat tentang masalah sosial di desa, perumusan asesmen kebutuhan komunitas, dan penyusunan perencanaan tindak lanjut yang partisipatif. Pemetaan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk melakukan asesmen kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek masalah, sumber masalah jenis masalah, potensi dan sistem sumber, dan kelembagaan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan masalah sosial. Hasil pemetaan pengetahuan masyarakat selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan asesmen komunitas, dan asesmen komunitas sebagai dasar penyusunan perencanaan. Melalui rangkaian

kegiatan ini, diharapkan kader desa benar-benar berdaya

Ke depan, kegiatan semacam ini dapat dikembangkan membuat aplikasi yang memudahkan kader desa atau siapapun yang akan membuat pemetaan pengetahuan masyarakat. Sesungguhnya, pengetahuan masyarakat di desa sangat beragam dan ditemukan disetiap bidang kehidupan masyarakat. Pemetaan pengetahuan masyarakat yang dilakukan oleh kader desa untuk kepentingan asesmen kebutuhan dan perencanaan penyelesaian masalah, merupakan bentuk pembangunan berfokus pada rakyat.

#### **REFERENSI**

- Chun-Chung Chow, J. & Peng, C. 2015. *Community-Needs Assessment*. Oxford: Oxford Bibliographies.
- De Beer, F. & Swanepoel, H. 1998. *Community Development and Beyond*. Western Cape: National Book Printers.
- Greenacre, L. & Akbar, S. 2019. The impact of payment method on shopping behaviour among low-income consumers. *Journal Retailing Consumption Services*. 47, 87–93.  
<https://www.lawinsider.com/dictionary/community-knowledge> Knowledge
- Mchombu, K.J. 2004. *Sharing Knowledge for Community Development and Transformation: a Handbook*. 2nd edition. Canada: Oxam. DOI:10.13140/2.1.3228.5124. ISBN:0-9694699-1-8
- Rudito, B. & Famiola, M. 2008. *Social Mapping. Teknik Memahami Suatu Masyarakat Atau Komuniti*. Bandung: Rekayasa Sains.